



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP. (021) 3843348, 3810350, 3457661 FAX. (021) 3810361
TROMOL POS NO. 1020 - JAKARTA 10010

Jakarta, 24 April 2012

Nomor : 209-1/SEK/KU.01/4/2012
Hal : Laporan Penyerapan Anggaran Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan dibawahnya Tahun Anggaran 2012

Yth.

1. Panitera
2. Para Direktur Jenderal
3. Para Kepala Badan
4. Ketua Pengadilan Tingkat Banding Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti surat undangan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Nomor TEP/S-26/03/2012 tanggal 29 Maret 2012 perihal Undangan Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Arahan Presiden tentang Peningkatan Kualitas Penyerahan Anggaran dan surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 62-1/Sek/KU.01/2/2012 tanggal 8 Februari 2012 hal Percepatan Penyerapan Anggaran Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya tahun anggaran 2012, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam pertemuan dengan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran seluruh Kementerian/Lembaga diminta untuk mempersiapkan penyusunan laporan percepatan anggaran tahun 2012 yang akan disampaikan kepada Presiden pada akhir bulan April 2012 melalui Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran.
2. Bahwa untuk mengamankan langkah dan arah kebijakan tersebut pada point 1, Sekretaris Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 011/Sek/SK/III/2012 tanggal 09 Februari 2012 tentang Penunjukan Petugas Penghubung Percepatan APBN dilingkungan Mahkamah Agung RI tahun anggaran 2012.
3. Disamping penyampaian laporan realisasi agar seluruh satker Tk. Banding dan satker dibawahnya menyusun rencana kegiatan, rencana penarikan dana serta rencana pengadaan barang dan jasa dan disampaikan kepada Petugas Penghubung selambat-lambatnya tanggal 30 April 2012 melalui email anggaranrenog@gmail.com.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Sekretaris Mahkamah Agung RI

Nurhadi
Nurhadi

Tembusan :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial ;
2. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI ;
3. Kepala Badan Urusan Administrasi MA RI.